









Dalam pelaksanaan sistem gembreg tersebut buruh tani melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemilik lahan. Seperti halnya saat proses penakaran gabah waktu panen yang dilakukan oleh penggarap sawah menghasilkan berat gabah yang diterima oleh pemilik sawah mempunyai berat yang tidak sesuai dengan takaran gabah yang diterima oleh penggarap sawah. Jika dalam menakar *gabah* untuk pembagian pemilik sawah, gabah ditakar sesuai dengan volume gembreg. Namun, untuk penakaran gabah yang akan menjadi bagian dari penggarap sawah, penakaran berbeda dengan takaran pemilik sawah, penggarap melakukan tindakan kecurangan dengan melebihi takaran gembreg tersebut dengan cara gabah yang dimasukkan kedalam gembreg tersebut ditekan agar supaya memperoleh berat yang maksimal. Dengan demikian pemilik sawah mengalami kerugian dalam kerjasama bagi hasil tersebut karena ada unsur kecurangan dalam proses pembagian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan realita tersebutlah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait maro sawah dengan menggunakan sistem gembreg di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, Dan untuk bahasan lebih lanjut akan dituang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kerjasama Maro Sawah Sistem Gembreg dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang)”.





























